

**RINGKASAN SKRIPSI/NASKAH PUBLIKASI**  
**PERAN KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN DALAM**  
**KORDINASI MELENGKAPI BERITA ACARA**  
**PEMERIKSAAN PADA TAHAP PRA-PENUNTUTAN**



**Diajukan oleh:**

**ROY NIRMAWAN HULU**

<b>NPM</b>	<b>: 110510616</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum (PK 2)</b>

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERAN KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN DALAM  
KORDINASI MELENGKAPI BERITA ACARA  
PEMERIKSAAN PADA TAHAP PRA-PENUNTUTAN**



**Diajukan oleh:**

**ROY NIRMAWAN HULU**

<b>NPM</b>	<b>: 110510616</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum</b>

**Telah Disetujui**

**Tanggal : 26 Januari 2015**

**Dosen/Pembimbing**

**G. Aryadi, SH.MH.**

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr. G. Sri Nurhartanto, SH. LL.M.**

# **PERAN KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN DALAM KORDINASI MELENGKAPI BERITA ACARA PEMERIKSAAN PADA TAHAP PRA-PENUNTUTAN**

**Roy Nirmawan Hulu**

**G. Aryadi**

**Ilmu Hukum/ Fakultas Hukum/ Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

## ***ABSTRACT***

Prosecutor as one of the law enforcement agencies have a vital role, especially in the case of the prosecution of criminal cases. Before becoming a public prosecutor in the trial, the prosecutor also has other important roles, namely the improvement of investigation report filed by the police as investigators. Of the examination of the file handed over to the prosecutor's investigators are deficient or incomplete and also not perfect. Therefore, one of the prosecutor's duties in the process of preprosecution as provided for in article 138 paragraph 2 of the code of criminal procedure is to restore the file to the investigator interrogation with instructions to complete and perfect it.

In terms of doing the above equipment interrogation the investigating authorities still run into confusion sometimes also be cluse in give by the prosecutor. Improvements already done so by the investigator still sometimes are seen shortcomings or imperfections. So as to prolong the process of preprosecution.

**Keyword:** Prosecutors, Investigation Report, Investigators

## **A. Latar belakang masalah**

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki peranan yang sangat vital, terutama dalam hal penuntutan perkara pidana. Selain berperan sebagai penuntut umum dalam proses persidangan, kejaksaan juga memiliki peran penting lainnya, yakni dalam penyempurnaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diajukan oleh pihak kepolisian selaku penyidik. Berkas Berita Acara pemeriksaan (BAP) dari penyidik yang dilimpahkan ke kejaksaan seringkali mengalami kekurangan atau belum lengkap dan juga belum sempurna. Salah satu tugas kejaksaan dalam proses prapenuntutan seperti yang diatur dalam Pasal 138 ayat 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah mengembalikan berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan disempurnakannya.

Dalam praktek, sering dijumpai permasalahan mengenai proses penyempurnaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik (Kepolisian), dengan tidak adanya aturan mengenai sampai berapa kali berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat diajukan dan dikembalikan, dapat mengakibatkan kasus yang ditangani terus menggantung tanpa kepastian yang jelas tentang status tersangka yang masih ditahan oleh pihak kepolisian, sehingga melanggar Hak Asasi Manusia dari tersangka. Selain itu, dengan tidak adanya kepastian mengenai pengajuan dan pengembalian berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dikhawatirkan kasus yang ditangani tidak kunjung selesai dan justru akhirnya menjadi daluarsa atau *verjar*. Ketidakjelasan hingga berapa kali Berita

Acara Pemeriksaan (BAP) dapat diajukan dan dikembalikan juga memungkinkan munculnya asumsi publik bahwa posisi kejaksaan sebagai penuntut umum lebih tinggi dari pihak kepolisian yang berperan sebagai penyidik.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 139 menyebutkan bahwa kejaksaan selaku penuntut umum memiliki wewenang untuk menentukan apakah berkas yang diajukan penyidik layak atau tidak untuk dilimpahkan ke Pengadilan, jika berkas tersebut tidak ada masalah dan dianggap telah lengkap dan sempurna maka dapat langsung dilimpahkan ke pengadilan, namun apabila belum lengkap atau sempurna, penuntut umum seperti yang disebutkan dalam Pasal 138 ayat 2 Kitab Undang undang Acara Pidana (KUHAP) dapat mengembalikan berkas tersebut ke penyidik berserta petunjuk untuk dilengkapi. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan lebih lengkap mengenai peran kejaksaan secara riil dalam penyempurnaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selain petunjuk untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), peran riil kejaksaan sangat dibutuhkan, karena dalam hal Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dikembalikan, jaksa mengetahui persis mengenai kekurangan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dikembalikan, karena keberadaan jaksa sebagai insitusi penegak hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum. Institusi kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses peneriksaan di

persidangan; sehingga keberdaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.<sup>1</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang yang telah teruraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut: Bagaimana Peran Kejaksaan Dan Kepolisian Dalam Kordinasi Melengkapi Berita acara Acara Penuntutan (BAP) pada Tahap Pra-penuntutan ?

# **KEWENAGAN KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAN**

## **A. Tinjauan Tentang Kejaksaan**

### **1. Pengertian Jaksa dan Polisi**

Kejaksaan yang berada di Indonesia merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya dalam bidang penuntutan di pengadilan. Jaksa sebagai badan yang berwenang dalam penegakkan hukum dan keadilan. Kejaksaan memiliki organisasi yang berwenang dalam memimpin, yaitu jaksa Agung yang berwenang untuk memimpin kejaksaan. Jaksa agung akan di pilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden, kejaksaan agung, kejaksaan Tinggi, dan kejaksaan Negeri merupakan satu kesatuan yang utuh dan dalam hal ini tidak dapat dipisahkan.

---

<sup>1</sup> Dr. Marwan Effendy, S.H. Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari prespektif hukum, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 2.

Dalam hal ini pengertian jaksa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di sebutkan pengertian jaksa pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana selain berperan dalam perkara pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum perdata dan tata usaha negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan tata usaha negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Dalam Undang-Undanag Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1), bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan

dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.

## **2. Ruang Lingkup Kejaksaan dan Kepolisian**

Kejaksaan dan kepolisian adalah dua institusi publik yang berperan aktif dalam menegakkan hukum publik di Indonesia. Kepolisian atau polisi berperan untuk menerima, menyelidiki, menyidik suatu tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup wilayahnya.

Apabila ditemukan unsur-unsur tindak pidana, baik khusus maupun umum, atau tertentu, maka pelaku (tersangka) akan diminta keterangan, dan apabila perlu akan ditahan. Dalam masa penahanan, tersangka akan diminta keterangannya mengenai tindak pidana yang diduga terjadi.

Selain tersangka, maka polisi juga memeriksa saksi-saksi dan alat bukti yang berhubungan erat dengan tindak pidana yang disangkakan. Keterangan tersebut terhimpun dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang apabila dinyatakan P21 atau lengkap, akan dikirimkan ke kejaksaan untuk dipersiapkan masa persidangannya di pengadilan.

Kejaksaan akan menjalankan fungsi pengecekan BAP dan analisis bukti-bukti serta saksi untuk diajukan ke pengadilan. Apabila kejaksaan berpendapat bahwa bukti atau saksi kurang mendukung, maka kejaksaan akan mengembalikan berkas tersebut ke kepolisian, untuk dilengkapi. Setelah lengkap, maka kejaksaan akan melakukan proses penuntutan perkara. Pada tahap ini, pelaku (tersangka) telah berubah statusnya menjadi



terdakwa, yang akan disidang dalam pengadilan. Apabila telah dijatuhkan putusan, maka status terdakwa berubah menjadi terpidana.

### **3. Fungsi dan Wewenang Kejaksaan dan Kepolisian**

Dalam pelaksanaan kekuasaan Negara khususnya di bidang penegakan hukum diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan kejaksaan negeri dan masing-masing tingkatan Kejaksaan mempunyai wilayah hukum. Mengenai wewenang kejaksaan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) ditegaskan bahwa kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainya, dan terdapat beberapa bidang di antaranya bidang pidana, perdata dan tata usaha Negara serta bidang ketertiban dan kesejahteraan umum, namun penulis dalam hal ini hanya membahas dan membatasi pada persoalan kewenangan di bidang pidana. Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana diatur dalam Pasal; 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia yang tertulis dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

Berdasarkan ketentuan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) dapat di lihat bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan memang sangat menentukan dalam membuktikan apakah seseorang atau korporasi terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Selain tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1), maka di mungkinkan pula bahwa Kejaksaan diberikan tugas dan wewenang tertentu berdasarkan Undang-Undang yang lain selain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan republik Indonesia misalnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Hal ini diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tertulis : Disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Dalam hal ini juga terdapat tugas dan wewenang kepolisian dalam menangani perkara yaitu

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum;
- b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketenteraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- d. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

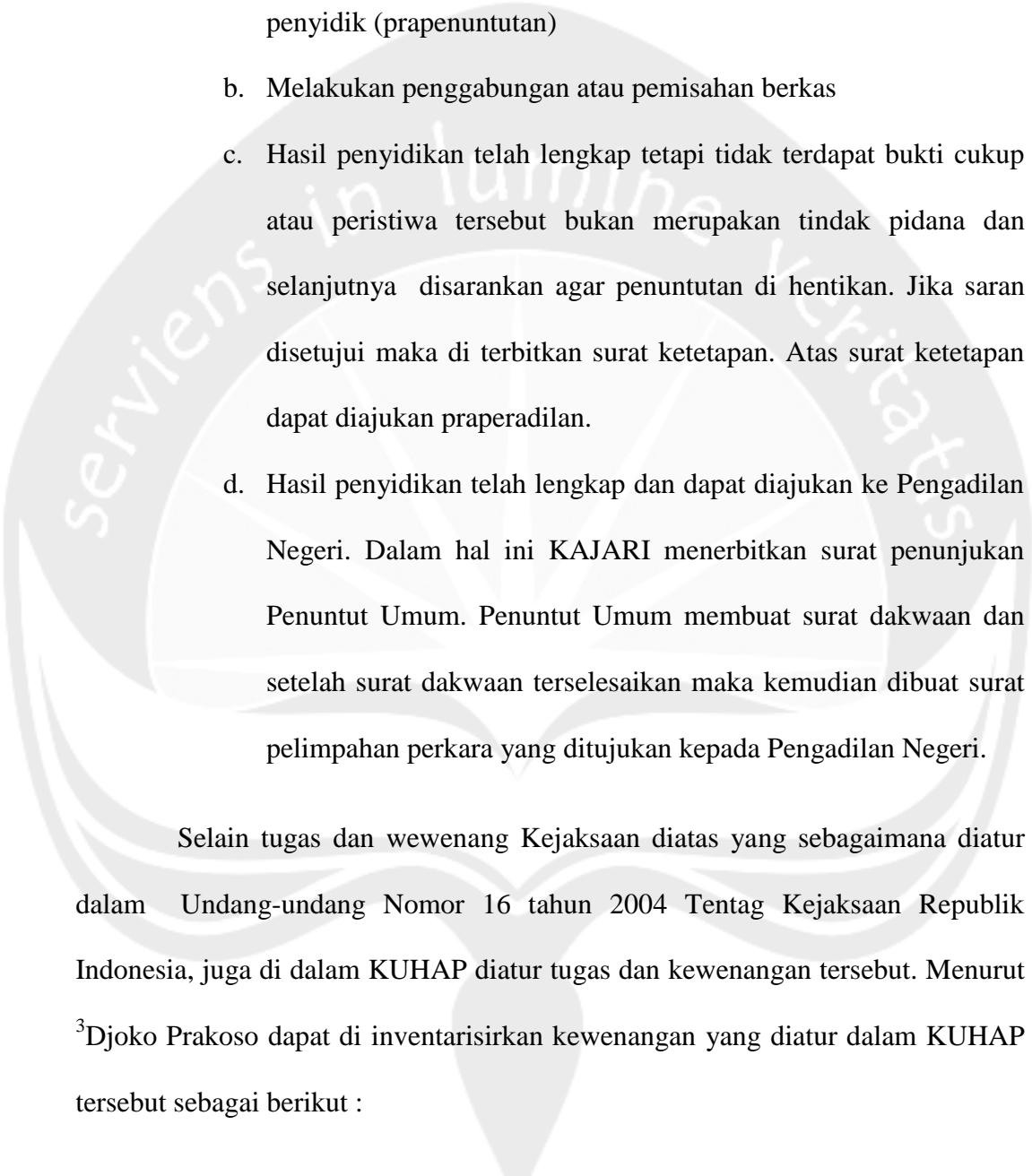
## **B. Tinjauan Tentang Penyerahan BAP Antara Kejaksaan dan Kepolisian**

### **1. Penyerahan BAP oleh kepolisian terhadap kejaksaan**

Dalam hal penuntutan pihak kejaksaan sebagai Penuntut Umum setelah menunjukkan salah seorang jaksa untuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian hasil penelitiannya diajukan kepada Kepala Kejaksaan negeri (KAJARI).<sup>2</sup> Menurut Leden Marpung ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam proses penuntutan yaitu :

---

<sup>2</sup> Marpaung, Leden, 1992, "Asas-Teori-Prakteik Hukum Pidana", Sinar Grafika, Jakarta, 19-20.

- 
- a. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan penyidik (prapenuntutan)
  - b. Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas
  - c. Hasil penyidikan telah lengkap tetapi tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar penuntutan di hentikan. Jika saran disetujui maka di terbitkan surat ketetapan. Atas surat ketetapan dapat diajukan praperadilan.
  - d. Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini KAJARI menerbitkan surat penunjukan Penuntut Umum. Penuntut Umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan terselesaikan maka kemudian dibuat surat pelimpahan perkara yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri.

Selain tugas dan wewenang Kejaksaan diatas yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 Tentag Kejaksaan Republik Indonesia, juga di dalam KUHAP diatur tugas dan kewenangan tersebut. Menurut

<sup>3</sup>Djoko Prakoso dapat di inventarisirkan kewenangan yang diatur dalam KUHAP tersebut sebagai berikut :

- a. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan seuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana

---

<sup>3</sup>Djoko Prakoso, 1987, "Polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum". Hlm 23-25

Pasal 109 ayat (1) dan pemberitahuan baik dari penyidik yang di maksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum

- b. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b. dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12)
- c. Mengadakan prapenuntutan Pasal 14 huruf (b) dengan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan materi Pasal 110 ayat (3,5) dan Pasal 138 ayat (1 dan 2).
- d. Memberikan perpanjangan penahanan Pasal 24 ayat (2), melakukan penahanan rumah Pasal 22 ayat (2), penahanan kota Pasal 11 ayat (3), serta mengalihkan jenis penahanan (Pasal 23)
- e. Dalam hal ini atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan, penahanan serta dapat mencabut penangguhan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang di tentukan (Pasal 31)
- f. Mengadakan penjualan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum yang terpantau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya terdapat dalam Pasal 45 ayat (1).

- g. Melanggar atau mengurangi kebebasan hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka sebagai akibat di salah gunakan haknya Pasal 70 ayat (4) dan mengawasi hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan Pasal 71 ayat (1) dan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara dapat mendengar isi pembicaraan tersebut Pasal 71 ayat (2).
- h. Meminta dilakukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menerima sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik (Pasal 80). Maksud Pasal 80 ini adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.
- i. Dalam perkara koneksitas, karena perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum menerima penyerahan perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang (Pasal 91 ayat (1)).
- j. Menentukan sikap apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139).
- k. Mengadakan tindakan lain antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan (Pasal 14 huruf i).

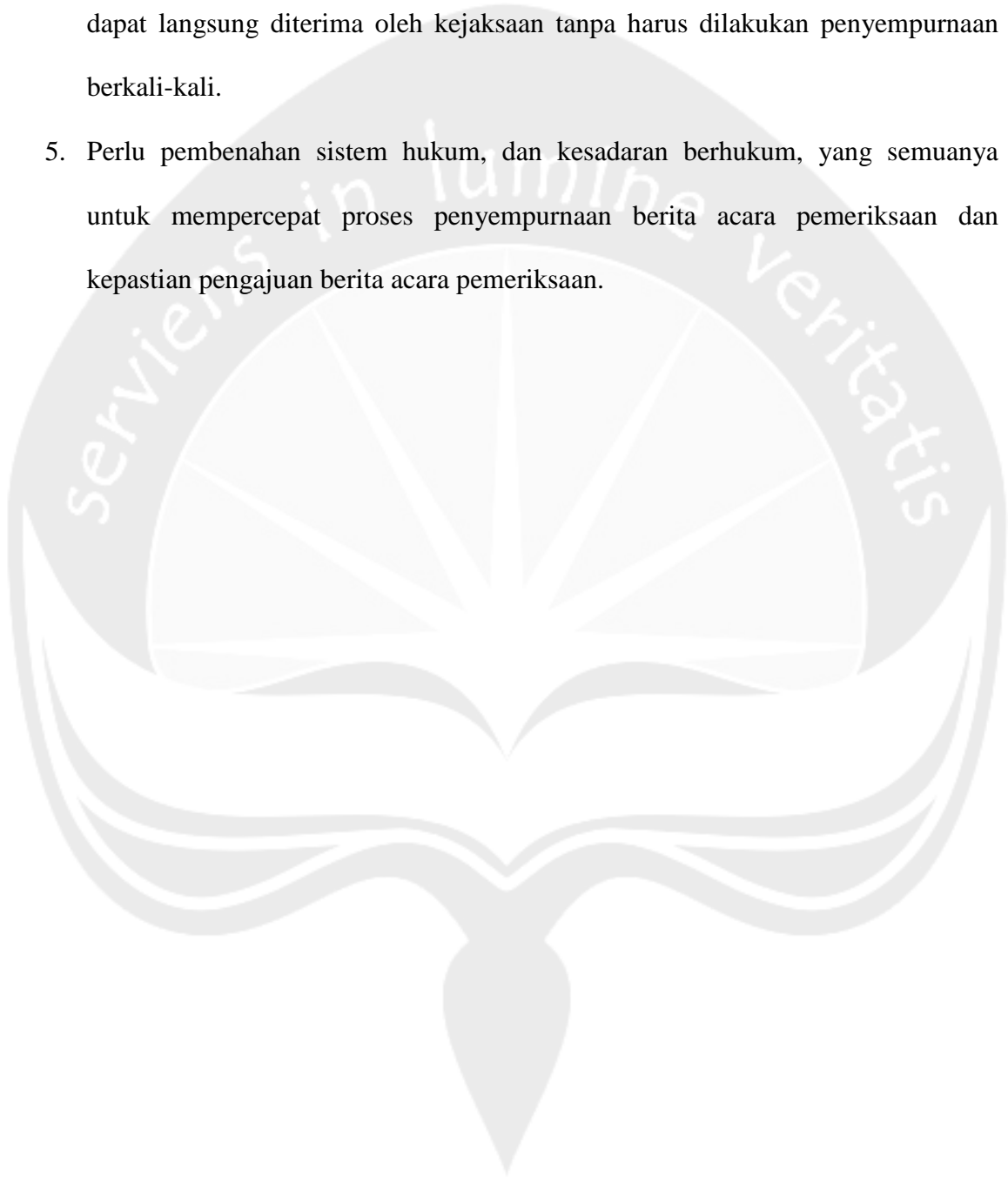
## **A. Kesimpulan**

1. Peran Kejaksaan dalam proses penyempurnaan berita acara pemeriksaan pada tahap prapenuntutan yaitu : Jaksa memberi pengarahan kepada penyidik karena pokok permasalahan dalam BAP tidak fokus, penyidik kurang tepat dalam mengenakan pasal terhadap tersangka, alat bukti yang dicantumkan dalam BAP kurang lengkap, keterangan dari saksi yang tidak dicantumkan dengan lengkap dalam BAP, modus operandi yang dilakukan tersangka dalam melakukan tindak pidana tidak dicantumkan dengan jelas dalam BAP, inventarisasi dalam BAP tidak dicantumkan dengan lengkap, terdapat kesalahan dalam BAP mengenai kelengkapan syarat formil dan syarat materil, serta sulit dan rumit mempelajari BAP.

## **B. Saran**

1. Terjalinya kerjasama antara aparat penegak hukum, jaksa dan polisi harus di tingkatkan supaya suatu perkara yang diajukan dapat secara cepat diterima dan dilanjutkan dalam pengadilan.
2. Perlu upaya-upaya untuk mengubah cara-cara berhukum yang kurang efektif dalam proses penyempurnaan berita acara pemeriksaan, yang memiliki keberanian untuk melakukan terobosan-terobosan hukum, apabila suatu teks peraturan perundang-undangan menghambat proses untuk mewujudkan keadilan.
3. Kejaksaan dan kepolisian keduanya haruslah saling melengkapi supaya tidak ada hambatan permasalahan penundaan perkara yang berdampak bagi pihak terdakwa.

4. Perlu diberikan pendidikan tambahan kepada pihak kepolisian tentang pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) supaya lebih mempercepat laporan sekaligus dapat langsung diterima oleh kejaksaan tanpa harus dilakukan penyempurnaan berkali-kali.
5. Perlu pembenahan sistem hukum, dan kesadaran berhukum, yang semuanya untuk mempercepat proses penyempurnaan berita acara pemeriksaan dan kepastian pengajuan berita acara pemeriksaan.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Bambang Poernomo, 1988, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.

DjokoPrakoso, 1987, *Polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum*.

Harun M. Husen, 1991, *Penyidikan dan penutupan dalam proses Pidana*.

Laden Marpaung, 2010, *Proses Penaganaa Perkara Pidana*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Loebby Loqman, 1990, *Pra-Peradilan Di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dar prespektif hukum*.

Mr.M.H Tirtaamidjaja, 1955, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Fasco Jakarta,

### Website :

<http://bernarddhonnie.wordpress.com/2012/11/07/uu-kejaksaan/>, Bernard  
Dhonnie, Undang-undang Kejaksaan, halaman 1, ming

<http://acarapidana.bphn.go.id/wp-content/uploads/2011/12/SEJAMPIDUM-B-401-E-9-1993-pelaksanaan-tugas-pra-penuntutan> pdf. diunduh pada tanggal 20 November 2014

<http://www.inherent-dikti.net/nota-jaksa-polisi-bpkp>. dpf diunduh pada tanggal 20 November 2014

<http://kupang.tribunnews.com/2014/10/04/19-kali-bap-kasus-pembunuhan-paulus-usnaat-bolak-balik-polisi-jaksa> diunduh pada tanggal 1 Desember 2014

<http://www.pontianak-times.com/kriminal/240414/kasus-pembunuhan-nanda-gelar-perkara>, diunduh pada tanggal 1 Desember 2014.

### Kamus :

Dapertemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

**PeraturanPerundang-Undagan :**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang  
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang  
Kejaksaan Republik Indonesia
3. KitabUndang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara  
Pidana